

ABSTRAK

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

YUDHA PRADANA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. UU tersebut mengubah dimensi pembangunan desa lebih berorientasi kepada pembangunan ekonomi melalui stimulus keuangan, dimana desa mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Besarnya kucuran dana desa dan dana desa yang dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengangkat permasalahan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber data lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pengawasan atas pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung masih belum ideal jika dipandang dari perspektif pemilihan objek pengawasan, jenis kegiatan pengawasan, jumlah hari dan personil pengawasan. Masih ditemukan hambatan pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketersediaan SDM, ketersediaan anggaran, dan beban kerja yang tinggi. Untuk itu, diperlukan suatu pola ideal pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui penguatan kelembagaan Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Pengawasan, Keuangan Desa, Inspektorat

ABSTRACT

SUPERVISION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT BY THE DISTRICT INSPECTORATE IN LAMPUNG PROVINCE

**By
YUDHA PRADANA**

Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives autonomous authority to village governments in managing and developing their villages. The law changes the dimension of village development to be more oriented towards economic development through financial stimulus, whereby villages receive an annual allocation of funds from the central government. The large disbursement of village funds and village funds allocated to all villages in Indonesia poses new challenges for the government. The main problem faced is transparency and accountability in village financial management. For this reason, it is necessary to supervise village financial management to ensure that village financial management runs in a transparent, accountable, orderly and disciplined budget, and is participatory in accordance with statutory provisions. Based on these problems, the author will raise the problem of supervising village financial management by the District Inspectorate in Lampung Province. The research method used is normative juridical research. Data sources use secondary data, namely laws and regulations, books, and other relevant data sources. The results of the study show that the supervisory model for village financial management by the District Inspectorate in Lampung Province is still not ideal from the perspective of selecting the object of supervision, the type of supervision activity, the number of days and the supervision personnel. There are still obstacles to overseeing village financial management based on the availability of human resources, budget availability, and high workload. For this reason, an ideal pattern of supervising village financial management is needed through strengthening the Regency Inspectorate institutions in Lampung Province and strengthening village government institutions.

Keywords: Supervision, Village Finance, Inspectorate